

KATA PENGANTAR

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) merupakan instrument pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga hak dan wewenang daerah dalam mengelola otonomi tetap sejalan dengan cita-cita pembangunan nasional dengan berpijak pada kepentingan nasional dimaksud. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban merupakan norma perekat hubungan hirarkis antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sehingga kedudukan dan peranan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban menjadi sangat penting dan menjadi salah satu kewajiban Kepala Daerah untuk dilaksanakan setiap tahun anggaran.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ini disusun sebagai bahan evaluasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian bagi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, sekaligus merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan ketugasan Pemerintah Daerah.

Ba'a, Januari 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Kabupaten Rote Ndao,



Regina A. V. Kedoh, S.STP,M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19800827 199912 2 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah.....	3
1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	4
1.2 Data Pegawai.....	5
 BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	 9
 BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	 16
3.1 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja.....	16
3.2 Realisasi Anggaran	20
3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-masing Kegiatan Pada Setiap Urusan Pemerintahan/Urusan Penunjang/Urusan Pendukung Pemerintahan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah Yang Di Hadapi Serta Solusi Pemecahannya.....	26
3.4 Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah di Tetapkan Dalam Perjanjian Kinerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022.....	33
3.5 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan.....	33
3.6 Tindak Lanjut rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya.....	34
 BAB IV PENUTUP.....	 35

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Rote Ndao (lembaran daerah kabupaten rote ndao tahun 2016 nomor 005, tambahan lembaran daerah kabupaten rote ndao nomor 135). Peraturan Bupati Kabupaten Rote Ndao Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

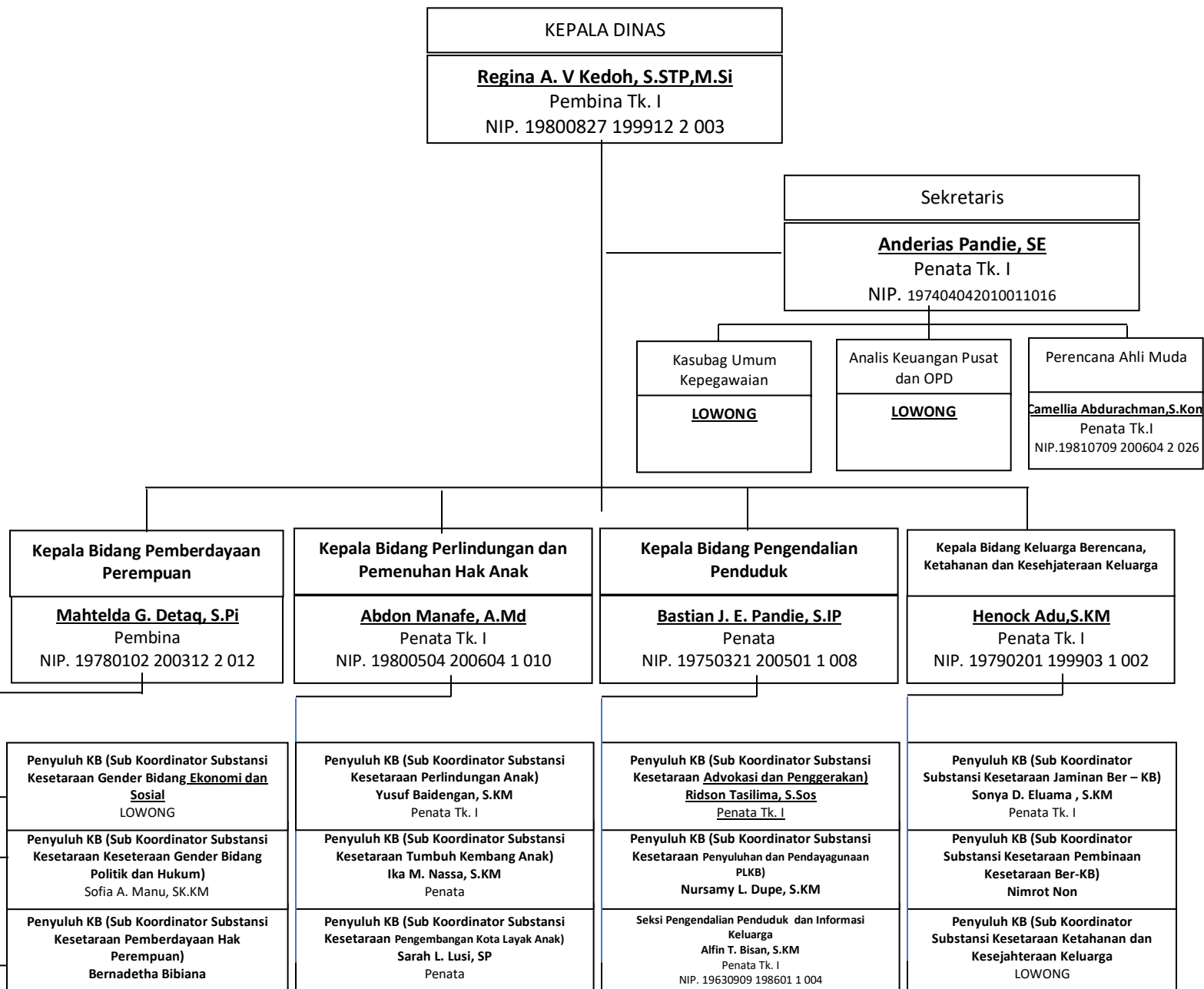
1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra dengan jumlah Pegawai, daftar aset dan anggaran sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

Bagan Struktur Organisasi 1.1 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016)



1.3 Data Pegawai

Daftar Nominatif Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022

No	Nama	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Pendidikan	Ket
1.	Regina A.V. Kedoh S.STP. M.Si/ NIP.198008271999122003	Pembina Tk. I/ IV.b	Kepala Dinas P3AP2KB	S2	
2.	Anderias Pandie, SE NIP. 197404042010011016	Pembina/IV. a	Sekretaris	S1	
3.	Abdon Manafe, A.Md NIP .198005042006041010	Penata Tk. I/IIId	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	D3	
4.	Bastian J. E. Pandie, S.IP NIP.197503212005011008	Penata/IIIC	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	S1	
5.	Mahtelda G. Detaq, S.Pi NIP.19780102 200312 2 012	Pembina/IV. a	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	S1	
6.	Henoch Adu, S.KM NIP .197902011999031002	Pembina/IV. a	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	S1	
7.	Nimrot Non NIP .196512311989031241	Penata Tk.I /III-d	Penyuluh KB (Sub Koordinator Substansi Pembinaan Kesetaraan Ber- KB)	SMA	
8.	Ridson Tasilima,S.Sos NIP .197508182006041003	Penata Tk.I /III-d	Penyuluh KB (Sub Koordinator Substansi Advokasi dan Pergerakan)	S1	
9.	Sofia A. Manu, S.KM NIP .198110112009042007	Penata Tk.I /III-d	Penyuluh KB (Sub Koordinator Substansi Kesejahteraan Gender Bidang Politik dan Hukum)	S1	
10.	Sonya D. Eluama, S.KM NIP .198110222009042009	Penata Tk.I /III-d	Penyuluh KB (Sub Koordinator	S1	

			Substansi Jaminan Ber-KB)		
11.	Alfin T. Bisan, S.KM NIP.197904062000122002	Penata Tk.I /III-d	Penyuluh KB (Sub Koordinator Substansi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga)	S1	
12.	Camellia Abdurachman, S.Kom NIP.198107092006042026	Penata Tk.I /III-d	Perencana Ahli Muda	S1	
13.	Sarah L. Lusi, SP NIP.197303042005012009	Penata Tk.I /III-d	Penyuluh KB (Sub Koordinator Substansi Pengembangan Kota Layak Anak)	S1	
14.	Nursamy F. Dupe, S.KM NIP.198902042011012004	Penata Tk.I /III-d	Penyuluh KB (Sub Koordinator Substansi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB)	S1	
15.	Ike M. Nassa, S.KM NIP .198808202011012012	Penata Tk.I /III-d	Penyuluh KB (Sub Koordinator Substansi Tumbuh Kembang Anak)	S1	
16.	Emri I.M Dethan NIP .197504142003121004	Penata Muda / III-a	Pelaksana	SMA	
17.	Melky A.F. Thutaes NIP .197905312003121005	Penata Muda / III-a	Pelaksana	SMA	
18.	Yeni Suryani, A.Md NIP .1978090220122002	Penata Muda / III-a	Pelaksana	D3	
19.	Petrus Bolla NIP .197912112007011008	Pengatur Tk. I/II-d	Pelaksana	SMA	
20.	Beny Oktovianus Pello NIP .197605062007011011	Penata Muda/III-a	Pelaksana	SMA	
21.	Joel Timu NIP .198302152006041018	Penata Muda/III-a	Pelaksana	SMA	
22	Amin Imanuel Faot, S.Sos NIP.19921225 202203 1 003	Penata Muda/ III-a	Fungsional Umum	S1	
23	Teresa Diana Kebewa Makin, S.Pi NIP.19970111 202203 2 003	Penata Muda/ III-a	Fungsional Umum	S1	

Sumber Data : Des 2023

1.3.1 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan

Jumlah Pejabat Struktural	Jumlah Pejabat Fungsional	Jumlah Fungsional Umum	Jumlah
7 Orang	9	8 Orang	23 Jumlah

1.3.2 Jumlah PNS Berdasarkan Kepangkatan

Golongan Kepangkatan			
Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I/a	-	-	0
I/b	-	-	0
I/c	-	-	0
I/d	-	-	0
II/a	-	-	0
II/b	-	-	0
II/c	-	-	0
II/d	1	-	1
III/a	5	2	7
III/b	-	-	0
III/c	1	-	1
III/d	3	7	10
IV/a	2	1	3
IV/b	-	1	1
IV/c	0	0	0
IV/d	0	0	0
TOTAL	13	12	23

1.3.3 Jumlah PNS Berdasarkan Pejabat Struktural

Jumlah Pejabat Struktural			
Eselon	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
I-a	-	-	0
I-b	-	-	0
II-a	-	-	0
II-b	-	1	1

III-a	-	1	1
III-b	3	1	4
IV-a	-	-	-
IV-b	-	-	0
TOTAL	3	3	6

1.3.4 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan			
Jenjang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
SD	-	-	0
SLTP	-	-	0
SLTA	6	-	6
D1	-	-	0
D2	-	-	0
D3	1	1	2
S1	5	9	14
S2	-	1	1
S3	-	-	0

1.3.5 Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan

Nama Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Struktural	4	2	6
Fungsional Umum	6	2	8
Fungsional Tertentu	2	7	9
TOTAL	12	11	23

BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH

Gambaran mengenai Program dan Kegiatan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Alokasi Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana semula **Rp. 11.670.235.300,-** bertambah sebesar **Rp. 2.406.826.400,-** atau **82,90 %** menjadi **Rp. 14.077.061.700,-** dengan rincian :

- a. Belanja Operasi semula **Rp. 11.479.235.300,-** bertambah senilai **Rp. 2.358.632.200,-** atau 82,95% menjadi **Rp. 13.837.867.500,-**
- b. Belanja Modal semula **Rp. 191.000.000,-** bertambah senilai **Rp. 48.194.200,-** atau **79,85%** menjadi **Rp. 239.194.200,-** dengan rincian :

TABEL 2.1

Perubahan Penjabaran Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN		
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.655.203.400	2.186.730.200	468.473.200
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.429.900,-	-	(2.429.900,-)
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.110.000,-	-	(1.110.000,-)
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.319.900,-	-	(1.319.900,-)
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.042.552.000	1.856.700.700	(185.851.300)
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.042.552.000	1.754.700.700	(287.851.300)
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	-	102.000.000,-	102.000.000,-

2.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	8.400.000	8.400.000	-
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8.400.000	8.400.000	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	300.000.000	-	(300.000.000)
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	300.000.000	-	300.000.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	82.508.000	82.508.000	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.998.000	4.998.000	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik	30.000.000	30.000.000	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000	20.000.000	-
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.510.000	27.510.000	-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.483.500	35.483.500	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	984.000	984.000	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.499.500	34.499.500	-
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	183.830.000	203.638.000	19.808.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	183.830.000	203.638.000	19.808.000
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	165.448.000	86.139.000	(79.309.000)
	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/kota	31.628.000	-	(31.628.000)
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	31.628.000	-	31.628.000
	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada organisasi	27.244.000	20.000.000	(7.244.000)

3.	Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/kota			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	27.244.000	20.000.000	(7.244.000)
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota	106.576.000	66.139.000	(40.437.000)
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	106.576.000	66.139.000	(40.437.000)
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	376.332.500	299.000.000	(77.332.500)
	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/kota	149.500.000	74.750.000	(74.750.000)
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	149.500.000	74.750.000	(74.750.000)
	Kegiatan Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/kota	226.832.500	173.420.000	(53.412.500)
	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	53.412.500	-	(53.412.500)
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	173.420.000	173.420.000	0
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	50.830.000	50.830.000
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	50.830.000	50.830.000

4.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	79.417.600	20.000.000	(59.417.600)
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten / kota	20.000.000	20.000.000	-
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	-
	Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	59.417.600	-	(59.417.600)
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	59.417.600	-	(59.417.600)
5.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	56.278.000	-	(56.278.000)
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/kota	56.278.000	-	(56.278.000)
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	56.278.000	-	(56.278.000)
6.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	368.808.000	392.728.000	23,920,000
	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/kota	93.728.000	168.478.000	74.750.000
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan kabupaten/Kota	93.728.000	93.728.000	-

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	74.750.000	74.750.000
	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	173.420.000	173.420.000	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	173.420.000	173.420.000	
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	101.660.000	50.830.000	(50.830.000)
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	101.660.000	50.830.000	(50.830.000)
	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.788.747.800	11.092.464.500	(28.230.550)
7.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	285.506.000	212.400.000	(73.106.000)
	Kegiatan Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	115.392.000	-	(115.392.000)
	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	115.392.000	-	115.392.000
	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	170.114.000	212.400.000	42.286.000

8.	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	45.914.000	-	(45.914.000)
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000	64.200.000	-
	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-	88.200.000	88.200.000
	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	60.000.000	60.000.000	-
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.999.353.000	9.760.764.500	3.641.411.500
	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	1.394.500.000	1.132.520.000	(261.980.000)
	Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	-	290.000.000	290.000.000
	Sub Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	423.400.000	1.020.000	(422,380,000)
	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000	150.000.000	-
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	250.000.000	130.000.000	(120,000,000)
	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di balai Penyuluhan KKBPK	491.100.000	481.500.000	(9,600,000)
	Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	80.000.000	80.000.000	-
	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	382.000.000	382.000.000
	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Pedesaan (IMP)	-	382.000.000	382.000.000
	Kegiatan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/kota	3.131.353.000	3.659.844.000	528,491,000
	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat	12.600.000	12.600.000	-

	Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesetaraan Penggunaan Metode Kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	976.646.000	976.646.000	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	2.078.335.000	2.083.626.000	5,291,000
	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	27.300.000	10.500.000	(16,800,000)
	Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta hak-hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan	36.472.000	576.472.000	540,000,000
	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.473.500.000	4.586.400.500	3,112,900,500
	Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1.015.000.000	4.136.900.500	3,121,900,500
	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	458.500.000	449.500.000	(9.000.000)
9.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.683.888.800	1.119.300.000	(564,588,800)
	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.683.888.800	1.119.300.000	(564,588,800)
	Sub Kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	556.466.300	-	(556.466.300)
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan	360.000.000	360.000.000	-

	dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	749.700.000	759.300.000	9,600,000
9.	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	17.722.500	-	(17.722.500)
	TOTAL	11.670.235.300	14.077.061.700	2,406,826,400

*Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023*

BAB III. HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

TABEL 3.1

Perjanjian Kinerja Antara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bersama Bupati Rote Ndao.

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,03 Poin	88.40
		Terwujudnya kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	Presentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	4,70 %	4.70
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,95 Point	49.1
2	Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,50 %	1.15
		Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	3,40 %	
		Meningkatnya Kualitas dan Aksebilitas Pelayanan KB, Ketahanan Keluarga dan Kesehatan Reproduksi serta mengendalikan angka kelahiran	Persentase Perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	100 %	100
			Rasio Aseptor KB	58 %	

			Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah 15-49	47,00 %	
			Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (AFR 15-19)	18 %	
			Cakupan PUS yang ingin ber – KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	6,30 %	
3	Meningkatnya Kualitas perlindungan terhadap perempuan dan pemenuhan hak – hak perempuan dan anak		Rasio KDRT	0,07%	0.09
		Terwujudnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	97 %	90.67
			Cakupan layanan pemulangan bagi anak perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100 %	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	86.139.000	73.817.100	85,69
II	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	299.000.000	244.534.500	81,78
III	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	20.000.000	19.621.000	98,11
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	392.728.000	327.948.850	83,51
V	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	212.400.000	163.336.000	76,90
VI	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	9.760.764.500	6.769.514.250	69,35
VII	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.119.300.000	1.048.250.000	93,65
VIII	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.186.730.200	2.101.476.891	96,10
TOTAL		14.077.061.700	10.741.613.949	76,31

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2023

3.2 REALISASI ANGGARAN

Adapun alokasi anggaran, program/kegiatan dan realisasi yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan rincian sebagai berikut :

Pada Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendapat alokasi anggaran **Rp. 14.077.061.700,-** realisasi sebesar **Rp. 10.741.613.949,-** atau **76,31%** dengan rincian :

- a. Belanja Operasional sebesar **Rp. 13.837.867.500,-** realisasi sebesar **Rp 10.507.001.249,-** atau 75,93%
- b. Belanja Modal sebesar **Rp. 239.194.200,-** realisasi **Rp. 234.612.700,-** atau 98,08%

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun Anggaran 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.186.730.200	2.094.592.249	96,79
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.856.700.700	1.803.777.441	97,15
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.754.700.700	1.701.782.411	96,99
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	102.000.000	101.995.000	99,97
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	8.400.000	8.400.000	100
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8.400.000	8.400.000	100
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	82.508.000	78.013.600	94,55
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.998.000	4.998.000	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	30.000.000	100

	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	15.505.600	78
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.510.000	27.510.000	100
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.483.500	22.231.238	62,65
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	984.000	984.000	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.499.500	21.247.238	81,59
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	203.638.000	182.170.000	89,46
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	203.638.000	182.170.000	89,46
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	86.139.000	73.817.100	85,70
8	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/kota	-	-	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	-	-	-
9	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/kota	20.000.000	19.988.100	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	20.000.000	19.988.100	100
10	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota	66.139.000	53.829.000	81,39
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	66.139.000	47.062.000	71,16

	Kewenangan Kabupaten/Kota			
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	229.000.000	244.534.500	106,78
11	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/kota	74.750.000	74.750.000	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	74.750.000	74.750.000	100
12	Kegiatan Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/kota	173.420.000	130.229.500	75,09
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	173.420.000	130.229.500	75,09
13	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.830.000	39.555.000	77,82
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.830.000	39.555.000	77,82
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	20.000.000	19.621.000	98,11
14	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten / kota	20.000.000	19.621.000	98,11
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	20.000.000	19.621.000	98,11

	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
V	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	392.728.000	327.948.850	83,51
15	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	168.478.000	160.562.500	95,30
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	93.728.000	90.762.500	96,83
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	74.750.000	69.800.000	93,37
16	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi	173.420.000	114.412.350	65,97
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	173.420.000	114.412.350	65,97
17	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.830.000	42.774.350	84,15
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.830.000	42.774.350	84,15
VI	PROGRAM PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	212.400.000	163.336.000	76,90
18	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	212.400.000	163.336.000	76,90
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	64.200.000	52.342.000	81,53

	Sistem Informasi Keluarga			
	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	88.200.000	51.000.000	57,82
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	60.000.000	59.994.000	99,99
VII	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	9.760.764.500	6.769.514.250	69,35
19	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	1.132.520.000	692.113.550	61,11
	Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	290.000.000	60.837.200	21
	Sub Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.020.000	1.020.000	100
	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000	42.816.000	28,54
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	130.000.000	120.400.000	92,62
	Sub Kegiatan Pengolahan Operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	481.500.000	452.240.350	93,92
	Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	80.000.000	14.800.000	18,5
20	Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	382.200.000	376.686.000	98,61
	Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	114.000.000	110.000.000	96,49
	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	268.000.000	266.686.000	99,51
21	Kegiatan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/kota	3.659.844.000	3.457.254.000	94,46

	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12.600.000	4.140.000	32,86
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesehtaraan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	976.646.000	919.195.000	94,12
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	2.083.626.000	1.997.698.000	95,88
	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	10.500.000	2.140.000	20,38
	Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	576.472.000	534.081.000	92,65
22	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan Pembinaan kesetaraan ber-KB	4.586.400.500	2.243.460.700	48,92
	Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	4.136.900.500	1.857.755.700	44,91
	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	449.500.000	358.705.000	79,80
IX	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.119.300.000	1.048.250.000	93,65
23	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.119.300.000	1.048.250.000	93,65
	Sub Kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga	-	-	-

	Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)			
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000	352.950.000	98,04
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Operasional bagi Pengelolah dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	759.300.000	695.300.000	91,57
	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	-	-	-
TOTAL		14.077.061.700	10.741.613.949	77,36

3.3 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.

Tabel 3.3

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	100%	99,99%	Tidak Mengalami Permasalahan dikarenakan Realisasi sesuai Kebutuhan Lapangan	-
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	99,94%	-	-
				Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	100%	99,94%	Tidak Mengalami Permasalahan dikarenakan Realisasi sesuai Kebutuhan Lapangan	-
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%		-
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	99,98%	Mengalami Permasalahan dikarenakan Realisasi tidak sesuai Kebutuhan Lapangan	-
				PROGRAM	100%	82%	-	-

				PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
				Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	-	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	-	-
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	75,09%	-	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	75,09%	-	-
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	77,82%		
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	77,82%		

				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	100%	98,11%	Tidak Mengalami Permasalahan dikarenakan Realisasi sesuai Kebutuhan Lapangan	-
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	98,11%	Tidak Mengalami Permasalahan dikarenakan Realisasi sesuai Kebutuhan Lapangan	-
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	98,11%	-	-
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	100%	78,61%	Tidak Mengalami Permasalahan dikarenakan Realisasi sesuai Kebutuhan Lapangan	-
				Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	89,95%	Tidak Mengalami Permasalahan dikarenakan Realisasi sesuai Kebutuhan Lapangan	-
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	87,22%		
				Koordinasi dan Sinkronisasi	100 %	93%		

				Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	100%	76,90%	-	-
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100%	76,90%	-	-
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	100%	81,53%	-	-
				Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	100%	57,82%		
				Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	100%	99,99%		
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	100%	72,74%	-	-
				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	100%	90,06%	-	-
				Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	100%	73,15%		
				Komunikasi dan Informasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	100%	100%		
				Promosi dan KIE	100%	99,95%	Mengalami Masalah	-

				Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			karena realisasi tidak sesuai kebutuhan lapangan	
				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Minilokakarya (Minilok)	100%	92,62%	Mengalami Masalah karena realisasi tidak sesuai kebutuhan Lapangan	-
				Pengolahan Operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	100%	95,17%		
				Pengendalian Program KKBPK	100%	97,75		
				Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	100%	98,61%		
				Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	100%	96,49%		
				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	100%	99,51%		
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	100%	94,46%	-	-
				Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan	100%	32,86%	-	-

				Jejaringnya				
				Peningkatan Kesetaraan Penggunaan Metode Jangka Panjang (MKJP)	100%	94,12%	Mengalami Masalah karena realisasi tidak sesuai kebutuhan Lapangan	-
				Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	100%	95,88%	-	-
				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100%	20,38%		
				Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	100%	92,65%		
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	86,44 %	48,98%	-	-
				Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	100%	44,03%	Mengalami masalah karena hampir semua desa/kel tidak melaksanakan kegiatan	
				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	100%	94,49%	-	-
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA	100%	93,65%	-	-

				SEJAHTERA (KS)				
				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100%	93,65%	-	-
				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100%	98,04%	-	-
				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100%	91,57%	-	-

3.4 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023.

Semua kegiatan pada program peningkatan pelayanan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023 sebagian terlaksana dengan baik tanpa adanya kendala karena rata-rata pencapaian penyerapan realisasi anggaran 78,66% dan sisanya merupakan anggaran yang tidak terpakai sesuai kebutuhan lapangan.

3.5 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Untuk Tahun 2023, Kebijakan Strategis yang Ditetapkan oleh Bupati Rote Ndao selaku Kepala Daerah tidak ada atau tidak langsung bersentuhan dengan Program Kegiatan untuk Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao.

BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 dibuat sebagai bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan Anggaran yang diberikan.

Ba'a, Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Rote Ndao,



Regina A. V. Kedoh, S.STP,M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19800827 199912 2 003

